



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SAMBUTAN
PADA ACARA SOSIALISASI DAN PELATIHAN
PENGUKURAN IPKD
TAHUN 2022

Palangkaraya, 23 Juni 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Syalom,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,

- ❖ Nara Sumber dari Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI;
- ❖ Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ❖ Kepala Bappedalitbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;

- ❖ Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ❖ Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; serta,
- ❖ Bapak/Ibu Hadirin undangan yang berbahagia.,

Pada kesempatan penuh keberkahan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita dapat bertemu dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin Undangan yang saya hormati,

Kita semua menyadari bahwa dalam beberapa dekade terakhir dan juga jauh ke depan nanti, tantangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah semakin meningkat, seiring dengan era digital yang menuntut adanya transparansi di berbagai bidang kehidupan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam rangka menciptakan *good governance*, guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam Berbangsa dan Bernegara. Untuk itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terarah, dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Akuntabilitas tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD, terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya, sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak

untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dengan demikian, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan komitmen dan kerja keras serta kesungguhan kita bersama, di berbagai jenjang pemerintahan maupun perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Hadirin Undangan yang saya hormati,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini salah satunya tercermin dari capaian WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut. Selain itu, kami juga terus melakukan berbagai upaya lainnya, khususnya sosialisasi, bimtek, dan pelatihan, seperti yang kita laksanakan saat ini.

Oleh karena itu, saya meminta semua peserta sosialisasi dan pelatihan ini, agar dapat menyerap dengan baik pemahaman teknis dan administrasi yang disampaikan oleh para narasumber, dan kemudian dengan penuh komitmen dapat segera melakukan entri data/dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian IPKD Tahun 2022 ini.

Dengan pengisian dokumen secara akurat dan tepat waktu, diharapkan kita dapat meningkatkan nilai capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk tahun 2022 ini, di mana hasil capaian sebelumnya pada tahun 2018 s/d 2020 masih banyak yang nilainya masuk kategori “perlu perbaikan”.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengucapkan terima kasih kepada Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, yang pada saatnya nanti dapat memberikan pemahaman dan pelatihan IPKD kepada Perangkat Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang langsung menangani proses penginputan data dan dokumen tahun 2021 dipersyaratkan dalam penginputan IPKD Tahun 2022 ini.

Hadirin Undangan yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, acara **Sosialisasi dan Pelatihan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2022** secara resmi **DIBUKA**.

Selamat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah-langkah kita bersama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, demi terwujudnya KALTENG MAKIN BERKAH.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN